



RENCANA KERJA 2026

DINAS SOSIAL KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL PROVINSI JAMBI
JALAN A. THALIB NOMOR 45
KOTA JAMBI



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Rencana Kerja (Renja) Organisasi Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan tahunan pada level satuan kerja organisasi perangkat daerah dan disusun sebagai penjabaran Rencana Strategis (Renstra) yang berisi informasi tentang rencana program dan kegiatan yang akan dikerjakan oleh OPD dalam satu tahun anggaran yang dilengkapi dengan kerangka anggaran dan kerangka regulasi serta memberi gambaran mengenai tujuan, sasaran dan target kinerja dan bagaimana pengorganisasian program dan kegiatan pelayanan OPD sesuai Tupoksinya.

Renja OPD memiliki fungsi yang sangat penting dalam melaksanakan pembangunan untuk menjaga kualitas sosial masyarakat yang berlangsung saat ini maka diperlukan rancangan awal dari rencana kerja Tahun 2026.

Untuk melaksanakan program pembangunan Tahun 2026 maka diperlukan kebijakan dan penyusunan Rancangan Rencana Kerja (Renja) Dinas Sosial Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jambi Tahun 2026 berdasarkan kebutuhan yang berorientasi skala prioritas sesuai dengan sumber daya yang dimiliki.

Renja disusun secara terpadu, partisipatif dan demokratis. Renja OPD digunakan sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Perangkat Daerah untuk penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja sebagai dasar pengusulan program/kegiatan yang akan dibiayai APBD Propinsi.

Dokumen Renja pada dasarnya merupakan suatu proses pemikiran strategis untuk menyikapi isu-isu yang berkembang dan mengimplementasikannya dalam program dan kegiatan. Kualitas dokumen Renja sangat ditentukan oleh kualitas program dan kegiatan yang akan dilaksanakan, sehingga penyusunan Renja sangat ditentukan oleh kemampuan dalam menyusun, mengorganisasikan, mengimplementasikan, mengendalikan dan mengevaluasi capaian program dan kegiatan sesuai tugas pokok dan fungsi OPD.

Penyusunan Renja merupakan tahapan awal yang harus dilakukan sebelum disempurnakan menjadi dokumen Renja yang definitif. Dalam prosesnya, penyusunan rancangan Renja mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam rancangan awal RKPD.

Adapun muatan dalam rancangan Rencana Kerja 2026, adalah:

1. Pendahuluan.
2. Evaluasi Renja sampai dengan Triwulan I Tahun 2024
3. Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat daerah
4. Penutup

B. Dasar Hukum

Rancangan Rencana Kerja Dinas Sosial, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jambi Tahun 2026 ini disusun dengan mempedomani:

1. Undang-Undang Nomor 19 Darurat Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 75) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Darurat Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005–2026 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang – Undang Nomor 11 tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

6. Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 tentang Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
9. Peraturan Pemerintah 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Pemerintah 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Pemerintah Daerah kepada DPRD dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
13. Peraturan Pemerintah Nomor : 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
14. Peraturan Pemerintah No. 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal

15. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
15. Peraturan Menteri Sosial RI N0. 129/HUK/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten / Kota
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2009 tentang Pembagian Urusan Kewenangan Provinsi dengan Kabupaten/Kota;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
18. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2008, tentang Urusan yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi Jambi (lembaran Daerah Pemerintah Provinsi Jambi Tahun 2008 Nomor 7);
19. Peraturan Daerah Nomor 14 tahun 2008 tentang Organisasi dan Tatakerja Dinas Daerah Provinsi Jambi (lembaran Daerah Pemerintah Provinsi Jambi Tahun 2008 Nomor 6);
20. Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2008 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jambi Nomor 16);
21. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jambi Tahun 2021- 2026;
22. Peraturan Gubernur Jambi Nomor 44 Tahun 2016 tentang Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Sosial, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jambi

C. Maksud dan Tujuan

1. Maksud

Adapun maksud disusunnya rancangan Rencana Kerja Dinas Sosial Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jambi Tahun 2026 adalah untuk

menggambarkan lebih terperinci mengenai rancangan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan dalam 1 (satu) tahun anggaran.

2. Tujuan

Sedangkan tujuan disusunnya Renja SKPD Dinas Sosial, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jambi Tahun 2026 adalah:

1. Sebagai pedoman/acuan dalam merencanakan dan merumuskan program dan kegiatan pembangunan dalam bidang kesejahteraan sosial, Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jambi
2. Sebagai pedoman kerja bagi aparatur Dinas Sosial, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jambi dalam rangka pencapaian visi dan misi Pemerintah Provinsi Jambi;
3. Adanya acuan bagi peningkatan akuntabilitas kinerja Dinas Sosial, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jambi.

D. Sistematika Penulisan

Penulisan rancangan Rencana Kerja Tahun 2026 pada Dinas Sosial Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jambi adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini memuat latar belakang penyusunan Rencana Kerja yang memuat uraian singkat, latar belakang, dasar hukum, maksud dan tujuan, struktur organisasi, sumber daya manusia serta sistematika penulisan rancangan awal Rencana Kerja.

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA TAHUN 2026

Bab ini memuat Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah, Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah, Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah, Review terhadap Rancangan Awal RKPD dan Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

Bab ini memuat Telaah Terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi, Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Perangkat Daerah, Program dan

Kegiatan

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Bab ini memuat indikator kinerja, kebutuhan dana indikatif dan sumber dana.

BAB V PENUTUP

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA

TRIWULAN III TAHUN 2025

A. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Tahun 2026

Pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Sosial Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jambi tahun 2025 pada Triwulan III menyesuaikan ketentuan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran (PPA). Gambaran umum program dan kegiatan Dinas Sosial Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jambi adalah sebagai berikut:

I. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI

1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

1. 1.1 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi

Kinerja SKPD

1.2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

1.2.1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

1.2.2 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD

1.3. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

1.3.1 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi

1.3.2 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan

1.4. Administrasi Umum Perangkat Daerah

1.4.1 Peralatan dan Perlengkapan Kantor

- 1.4.2 Penyediaan Bahan Logistik Kantor
- 1.4.3 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
- 1.5. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - 1.5.1 Pengadaan Mebel
 - 1.5.2 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
- 1.6. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - 1.6.1 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - 1.6.2 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- 1.7. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - 1.7.1 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan
 - Perorangan Dinas atau Kendaraan
 - 1.7.2 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
 - 1.7.3 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

II. PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL

- 2.1. Penerbitan Izin Pengumpulan Sumbangan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam
1 (satu) Daerah Provinsi
 - 2.1.1 Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang
- 2.2. Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Provinsi
 - 2.2.1 Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Provinsi
 - 2.2.2. Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Provinsi
 - 2.2.3 Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Provinsi
 - 2.2.4 Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan

III. PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK

KEKERASAN

3.1. Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk dipulangkan Ke Daerah Kabupaten/Kota

3.1.1 Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah

IV. PROGRAM REHABILITASI SOSIAL

4.1. Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di dalam Pant

4.1.1 Penyediaan Permakanan

4.1.2 Penyediaan Sandang

4.1.3 Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses

4.1.4 Penyediaan Alat Bantu

4.1.5 Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Dalam Pant

4.1.6 Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial

4.1.7 Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari

4.1.8 Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga

4.1.9 Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga

4.1.10 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Bidang Rehabilitasi Sosial

Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar

4.2. Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Dalam Pant

4.2.1 Pengasuhan

4.2.2 Penyediaan Makanan

4.2.3 Penyediaan Sandang

4.2.4 Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses

4.2.5 Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Dalam Pant

4.2.6 Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial

4.2.7 Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-hari

4.2.8 Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar

4.2.9 Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga

4.3. Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Pant

4.3.1 Penyediaan Permakanan

4.3.2 Penyediaan Sandang

- 4.3.3 Penyediaan Asrama yang mudah Diakses
- 4.3.4 Alat Bantu
- 4.3.5 Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Sosial
- 4.3.6 Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial
- 4.3.7 Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari
- 4.3.8 Fasilitasi Pembuatan NIK bagi Penyandang Disabilitas
- 4.3.9 Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga
- 4.3.10 Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga
- 4.3.11 Pemulasaraan
- 4.3.12 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi

Sosial

Dasar Gelandangan dan Pengemis Terlantar di dalam Panti

- 4.4. Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis di dalam Panti
 - 4.4.1 Penyediaan Permakanan
 - 4.4.2 Penyediaan Sandang
 - 4.4.3 Penyediaan Asrama/Wisma yang mudah Diakses
 - 4.4.4 Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti
 - 4.4.5 Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial
 - 4.4.6 Pemulangan ke Daerah Asal
 - 4.4.7 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi

Sosial

Dasar Gelandangan dan Pengemis Terlantar di dalam Panti

- 4.5. Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)
Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA di dalam panti
 - 4.5.1 Penyediaan Permakanan
 - 4.5.2 Penyediaan Sandang
 - 4.5.3 Penyediaan Asrama/Wisma yang mudah Diakses
 - 4.5.4 Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti
 - 4.5.5 Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial
 - 4.5.6 Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari
 - 4.5.7 Pemberian Bimbingan Keterampilan Dasar
 - 4.5.8 Pemulangan ke Daerah Asal

4.5.9 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Bidang Rehabilitasi

Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)
Lainnya di

Luar HIV/AIDS dan NAPZA

V. PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL

5.1. Pengangkatan Anak antar WNI dan Pengangkatan Anak oleh Orang Tua Tunggal

5.1.1 Pengangkatan Anak antar WNI

5.2. Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Provinsi

5.2.1 Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga

5.2.2 Pengelolaan Fakir Miskin Lintas Daerah Kabupaten/Kota

5.2.3 Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat

VI. PROGRAM PENANGANAN BENCANA

6.1. Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Provinsi

6.1.1 Penyediaan Permakanan

6.1.2 Penyediaan Sandang

6.1.3 Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi

6.1.4 Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan

6.1.5 Pelayanan Dukungan Psikososial

VII. PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN

7.1. Pengelolaan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi

7.1.1 Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi

7.1.2 Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi

7.1.3 Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi

VIII. PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK

8.1. Pelayanan Pendaftaran Kependudukan

8.1.1 Penetapan Kebijakan Teknis di Bidang Pendaftaran Penduduk Berdasarkan Kebijakan Nasional

8.1.2 Pendataan Penduduk NonPermanen dan Rentan Administrasi Kependudukan Lintas Kabupaten/Kota dalam Satu Provinsi

8.2. Penyelenggaraan Pendaftaran Kependudukan

8.2.1 Fasilitasi Terkait Pendaftaran Penduduk

8.3. Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pendaftaran Kependudukan

8.3.1 Bimbingan Teknis terkait Pendaftaran Penduduk

IX. PROGRAM PENCATATAN SIPIL

9.1. Penyelenggaraan Pencatatan Sipil di Provinsi

9.1.1 Fasilitasi terkait Pencatatan Sipil

9.2. Pemberian Konsultasi Penyelenggaraan Pencatatan Sipil

9.2.1 Bimbingan Teknis terkait Pencatatan Sipil

X. PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI
KEPENDUDUKAN

10.1. Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Provinsi

10.1.1 Fasilitasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan

10.1.2. Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan

10. 2. Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi
Kependudukan

Provinsi

10.2.1 Pembinaan dan Pengawasan terkait Pengelolaan Informasi Administrasi
Kependudukan

10.2.2 Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi
Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan

XI. PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN

11.1. Penyediaan Profil Kependudukan

11.1.1 Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi kependudukan

serta

Kebutuhan yang lain

Realisasi capaian Program dan Kegiatan pada **Triwulan III** tahun Anggaran 2025 dengan nilai Pagu Rp. **29.260.596.204** adalah **Rp. 16.807.144.880** atau **57.44 %**. Rincian Capaian Realisasi sub kegiatan tersebut adalah sebagai berikut :

TABEL 1.
 DAFTAR REKAPITULASI LAPORAN PERKEMBANGAN PELAKSANA KEGIATAN (LPPK)
 KEGIATAN BELANJA LANGSUNG APBD PROVINSI JAMBI TAHUN 2025
 (POSISI: BULAN SEPTEMBER 2025)

**REKAPITULASI LAPORAN PERKEMBANGAN PELAKSANAAN KEGIATAN
 KEGIATAN BELANJA DAERAH APBD PROVINSI JAMBI TAHUN 2025**

**DINAS SOSIAL, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL PROVINSI
 JAMBI**

No	Program / Kegiatan	Anggaran Belanja	Realisasi Jenis Belanja		Realisasi Anggaran Belanja	% Realisasi Keuangan	% Realisasi Fisik	Sisa Anggaran
			Belanja Operasi	Belanja Modal				
1	2	8	9	10	13	14	15	16
I. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI								
1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		330.625.100	91.148.000	0	91.148.000	27,57	31,02	239.477.100
1	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	330.625.100	91.148.000	0	91.148.000	27,57	31,02	239.477.100

2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		16.802.928.119	10.913.885.965	0	10.913.885.965	64,95	61,72	5.889.042.154
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	16.575.207.119	10.774.799.965	0	10.774.799.965	65,01	61,73	5.800.407.154
2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	227.721.000	139.086.000	0	139.086.000	61,08	61,08	88.635.000
3. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		18.999.900	0	0	0	0,00	0,00	18.999.900
1	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	18.999.900	0	0	0	0,00	0,00	18.999.900
4. Administrasi Umum Perangkat Daerah		366.959.362	206.236.728	20.134.000	226.370.728	61,69	61,69	140.588.634
1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	8.563.690	8.563.690,00	0	8.563.690	100,00	100,00	0
2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	38.917.550	18.783.550	20.134.000	38.917.550	100,00	100,00	0
3	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	28.040.640	9.567.420	0	9.567.420	34,12	34,12	18.473.220
4	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	291.437.482	169.322.068	0	169.322.068	58,10	58,10	122.115.414
5. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		0	0	0	0	0,00	0,00	0
1	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	0	0	0	0	0,00	0,00	0
6. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		1.432.094.590	774.121.249	0	774.121.249	54,06	54,06	657.973.341
1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	712.358.400	398.162.249	0	398.162.249	55,89	55,89	314.196.151

2	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	719.736.190	375.959.000	0	375.959.000	52,24	52,24	343.777.190
7. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		530.810.000	192.251.774	0	192.251.774	36,22	36,44	338.558.226
1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan	478.380.000	186.571.774	0	186.571.774	39,00	39,25	291.808.226
2	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	11.950.000	5.680.000	0	5.680.000	47,53	47,53	6.270.000
3	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	40.480.000	0	0	0	0,00	0,00	40.480.000
II. PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL								
1. Penerbitan Izin Pengumpulan Sumbangan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi		13.583.200	2.960.700	0	2.960.700	21,80	21,80	10.622.500
1	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	13.583.200	2.960.700	0	2.960.700	21,80	21,80	10.622.500
2. Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Provinsi		770.225.900	100.755.555	0	100.755.555	13,08	13,08	669.470.345
1	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Provinsi	221.050.000	725.000	0	725.000	0,33	0,33	220.325.000
2	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Provinsi	304.174.000	74.747.500	0	74.747.500	24,57	24,57	229.426.500

3	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan	245.001.900	25.283.055	0	25.283.055	10,32	10,32	219.718.845
III. PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN								
1. Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk dipulangkan Ke Daerah Kabupaten/Kota		246.987.200	131.159.975	0	131.159.975	53,10	53,10	115.827.225
1	Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah	246.987.200	131.159.975	0	131.159.975	53,10	53,10	115.827.225
IV. PROGRAM REHABILITASI SOSIAL								
1. Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di dalam Panti		3.110.326.833	1.758.018.145	0	1.758.018.145	56,52	51,85	1.352.308.688
1	Penyediaan Permakanan	1.657.710.000	1.047.985.130	0	1.047.985.130	63,22	54,46	609.724.870
2	Penyediaan Sandang	88.284.379	86.454.012	0	86.454.012	97,93	97,93	1.830.367
3	Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses	1.017.996.780	537.168.363	0	537.168.363	52,77	52,77	480.828.417
4	Penyediaan Alat Bantu	2.780.000	0	0	0	0,00	0,00	2.780.000
5	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Dalam Panti	18.548.300	18.527.000	0	18.527.000	99,89	100,00	21.300
6	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial	78.400.000	15.000.000	0	15.000.000	19,13	19,13	63.400.000
7	Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari	13.726.040	13.724.640	0	13.724.640	99,99	100,00	1.400
8	Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan bagi Penyandang Disabilitas	960.000	0	0	0	0,00	0,00	960.000

Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2026
Dinas Sosial Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jambi

9	Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	2.397.334	750.000	0	750.000	31,28	31,28	1.647.334
10	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	41.796.000	12.120.000	0	12.120.000	29,00	29,00	29.676.000
11	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	7.921.000	0	0	0	0,00	0,00	7.921.000
12	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Bidang Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar	179.807.000	26.289.000	0	26.289.000	14,62	14,62	153.518.000
2. Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Dalam Panti		1.018.811.965	505.176.300	0	505.176.300	49,58	48,02	513.635.665
1	Pengasuhan	2.243.000	0	0	0	0,00	0,00	2.243.000
2	Penyediaan Makanan	324.167.104	142.304.000	0	142.304.000	43,90	38,99	181.863.104
3	Penyediaan Sandang	46.655.776	38.493.000	0	38.493.000	82,50	82,50	8.162.776
4	Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses	389.066.166	224.778.600	0	224.778.600	57,77	57,77	164.287.566
5	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Dalam Panti	5.282.477	0	0	0	0,00	0,00	5.282.477
6	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial	42.194.322	29.491.000	0	29.491.000	69,89	69,89	12.703.322
7	Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-hari	51.711.120	37.152.000	0	37.152.000	71,85	71,85	14.559.120
8	Fasilitasi Pembuatan Akta Kelahiran, Nomor Induk Kependudukan, dan Kartu Identitas Anak	2.250.000	0	0	0	0,00	0,00	2.250.000
9	Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	129.400.000	32.957.700	0	32.957.700	25,47	25,47	96.442.300
10	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	13.090.000	0	0	0	0,00	0,00	13.090.000

Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2026
Dinas Sosial Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jambi

11	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	12.752.000	0	0	0	0,00	0,00	12.752.000
12	Akses Layanan Pengasuhan kepada Keluarga Penganti	0	0	0	0	0,00	0,00	0
13	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti	0	0	0	0	0,00	0,00	0
3. Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti		1.358.411.044	747.777.390	0	747.777.390	55,05	50,86	610.633.654
1	Penyediaan Permakanan	801.000.000	418.866.000	0	418.866.000	52,29	45,19	382.134.000
2	Penyediaan Sandang	24.480.000	24.480.000	0	24.480.000	100,00	100,00	0
3	Penyediaan Asrama yang mudah Diakses	166.018.484	105.927.484	0	105.927.484	63,80	63,80	60.091.000
4	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Sosial	200.614.951	88.500.000	0	88.500.000	44,11	44,11	112.114.951
5	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial	71.100.000	40.000.000	0	40.000.000	56,26	56,26	31.100.000
6	Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari	57.285.322	45.618.306	0	45.618.306	79,63	79,63	11.667.016
7	Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan bagi Penyandang Disabilitas	1.350.000	0	0	0	0,00	0,00	1.350.000
8	Pemulasaraan	25.000.000	18.005.600	0	18.005.600	72,02	72,02	6.994.400
9	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis Terlantar di dalam Panti	11.562.287	6.380.000	0	6.380.000	55,18	55,18	5.182.287

4. Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis di dalam Panti		230.946.965	102.041.741	0	102.041.741	44,18	44,21	128.905.224
1	Penyediaan Permakanan	106.695.000	33.354.000	0	33.354.000	31,26	31,26	73.341.000
2	Penyediaan Sandang	14.108.762	10.668.000	0	10.668.000	75,61	75,61	3.440.762
3	Penyediaan Asrama/Wisma yang mudah Diakses	76.724.664	45.416.500	0	45.416.500	59,19	59,19	31.308.164
4	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti	5.939.281	5.870.281	0	5.870.281	98,84	100,00	69.000
5	Pemberian Bimbingan Fisik,Mental, Spritual dan Sosial	9.775.415	6.732.960	0	6.732.960	68,88	68,88	3.042.455
6	Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari	6.900.000	0	0	0	0,00	0,00	6.900.000
7	Pemberian Bimbingan Keterampilan Dasar	2.444.843	0	0	0	0,00	0,00	2.444.843
8	Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Identitas Anak	28.000	0		0	0,00	0,00	28.000
9	Akses Kelayanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	84.000	0	0	0	0,00	0,00	84.000
10	Pemulangan ke Daerah Asal	8.247.000	0	0	0	0,00	0,00	8.247.000
11	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis Terlantar di dalam Panti	0	0		0	0,00	0,00	0
5. Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA di dalam panti		363.102.305	87.787.180	0	87.787.180	24,18	24,18	275.315.125

Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2026
Dinas Sosial Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jambi

1	Penyediaan Permakanaan	106.695.000	10.500.000	0	10.500.000	9,84	9,84	96.195.000
2	Penyediaan Sandang	11.580.600	0	0	0	0,00	0,00	11.580.600
3	Penyediaan Asrama/Wisma yang mudah Diakses	78.946.104	34.260.000	0	34.260.000	43,40	43,40	44.686.104
4	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti	3.755.242	0	0	0	0,00	0,00	3.755.242
5	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial	3.600.000	0	0	0	0,00	0,00	3.600.000
6	Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari	9.899.800	0	0	0	0,00	0,00	9.899.800
7	Pemberian Bimbingan Keterampilan Dasar	3.482.059	0	0	0	0,00	0,00	3.482.059
8	Akses Kelayanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	0	0	0	0	0,00	0,00	0
9	Pemulangan ke Daerah Asal	11.250.000	0	0	0	0,00	0,00	11.250.000
10	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Bidang Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA	133.893.500	43.027.180	0	43.027.180	32,14	32,14	90.866.320

V. PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL

1. Pengangkatan Anak antar WNI dan Pengangkatan Anak oleh Orang Tua Tunggal		44.067.570	6.060.000	0	6.060.000	13,75	13,75	38.007.570
1	Pengangkatan Anak antar WNI	44.067.570	6.060.000	0	6.060.000	13,75	13,75	38.007.570
2. Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Provinsi		1.745.188.800	908.037.993	0	908.037.993	52,03	52,04	837.150.807
1	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	1.452.391.500	719.587.600	0	719.587.600	49,55	49,55	732.803.900

2	Pengelolaan Fakir Miskin Lintas Daerah Kabupaten/Kota	116.924.000	43.221.393	0	43.221.393	36,97	36,97	73.702.607
3	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	175.873.300	145.229.000	0	145.229.000	82,58	82,58	30.644.300
VI. PROGRAM PENANGANAN BENCANA		15,20006662						
1. Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Provinsi		480.194.836	72.989.935	0	72.989.935	15,20	15,20	407.204.901
1	Penyediaan Permakanan	382.763.800	67.405.935	0	67.405.935	17,61	17,61	315.357.865
2	Penyediaan Sandang	53.098.400	0	0	0	0,00	0,00	53.098.400
3	Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	13.000.000	0	0	0	0,00	0,00	13.000.000
4	Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	16.489.636	0	0	0	0,00	0,00	16.489.636
5	Pelayanan Dukungan Psikososial	14.843.000	5.584.000	0	5.584.000	37,62	37,62	9.259.000
VII. PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN		15,20006662						
1. Pengelolaan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi		143.992.575	57.112.077	0	57.112.077	39,66	39,66	86.880.498
1	Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi	21.811.000	4.845.000	0	4.845.000	22,21	22,21	16.966.000
2	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi	50.181.575	14.767.077	0	14.767.077	29,43	29,43	35.414.498
3	Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi	72.000.000	37.500.000	0	37.500.000	52,08	52,08	34.500.000
VIII. PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK		15,20006662						
1. Penyelenggaraan Pendaftaran Kependudukan		63.852.040	35.251.895	0	35.251.895	55,21	55,21	28.600.145
1	Fasilitasi Terkait Pendaftaran Penduduk	63.852.040	35.251.895	0	35.251.895	55,21	55,21	28.600.145

IX. PROGRAM PENCATATAN SIPIL								
1. Penyelenggaraan Pencatatan Sipil di Provinsi		58.626.000	32.406.525	0	32.406.525	55,28	55,28	26.219.475
1	Fasilitasi terkait Pencatatan Sipil	58.626.000	32.406.525	0	32.406.525	55,28	55,28	26.219.475
X. PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN								
1. Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Provinsi		36.392.000	12.948.000	0	12.948.000	35,58	35,58	23.444.000
1	Fasilitasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	36.392.000	12.948.000	0	12.948.000	35,58	35,58	23.444.000
2. Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Provinsi		87.673.900	48.359.753	0	48.359.753	55,16	55,16	39.314.147
1	Pembinaan dan Pengawasan terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	87.673.900	48.359.753	0	48.359.753	55,16	55,16	39.314.147
XI. PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN								
1. Penyediaan Profil Kependudukan		5.796.000	524.000	0	524.000	9,04	9,04	5.272.000
1	Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi kependudukan serta Kebutuhan yang lain	5.796.000	524.000	0	524.000	9,04	9,04	5.272.000
TOTAL		29.260.596.204	16.787.010.880	20.134.000	16.807.144.880	57,44	57,55	12.453.451.324

B. Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Sosial Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jambi

Dinas Sosial Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jambi sebagai lembaga teknis daerah yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 8 tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah provinsi jambi, dalam melaksanakan kegiatan dalam kedudukannya yang mengacu pada Peraturan Gubernur Jambi Nomor 44 tahun 2016 Tentang Kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja Dinas Sosial, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jambi. Pelayanan Organisasi yang akan dilaksanakan oleh Dinas Sosial, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jambi, adalah sebagai berikut :

- a. Meningkatkan pelayanan administrasi dengan berorientasi pada peningkatan kinerja dan kebutuhan pelayanan.
- b. Meningkatkan ketersediaan kebutuhan sarana dan prasarana aparatur yang efektif sesuai dengan proporsi kerja yang dibebankan kepada SKPD.
- c. Meningkatkan disiplin aparatur melalui pemenuhan kebutuhan aparatur yang efektif dan efisien.
- d. Meningkatkan kapasitas dan SDM aparatur melalui pembinaan dan peningkatan pengetahuan aparatur.
- e. Meningkatkan Sistem Pengembangan Sistem Pelaporan Organisasi, melalui penajaman visi dan misi organisasi dan Pemerintah Provinsi Jambi ke dalam Perencanaan yang tepat sesuai kebutuhan pelayanan sektor publik.
- f. Meningkatkan ketersediaan Basis Data Terpadu PMKS dan PSKS dalam rangka penentuan arah dan kebijakan penyelenggaraan pembangunan Kessos.

Adapun lingkup pelayanan wajib Dinas Sosial Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jambi, terdiri atas :

1. Sekretariat
2. Bidang Pemberdayaan Sosial;
3. Bidang Rehabilitasi Sosial;
4. Bidang Perlindungan dan Jaminan Bantuan Sosial;
5. Bidang Pemberdayaan Fakir Miskin; dan

6. Bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil
7. UPTD PSTW Budi Luhur
8. UPTD PSBAWEP Harapan Jaya

Pencapaian kinerja Pelayanan Dinas Sosial Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jambi melalui bidang urusan tersebut diatas dapat dilihat capaian kinerja Triwulan II sebagai berikut :

**LAPORAN REALISASI CAPAIAN KINERJA,KEUANGAN DAN KEBIJAKAN
PERIODE SAMPAI DENGAN BULAN SEPTEMBER 2025 (TRIWULAN III)**

NO	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN	TARGET KINERJA PERTAHUN		TARGET KINERJA	REALISASI CAPAIAN KINERJA	
		JUMLAH	SATUAN	TRIWULAN III (SATUAN)	S.D. September (SATUAN)	%
1	2	3	4	5	6	7
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI					
	1 <i>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>	36	laporan	12 Laporan	12 Laporan	100
	1 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	36	Laporan	12 Laporan	12 Laporan	100
	2 <i>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</i>	32	laporan	7 Laporan	7 Laporan	100
	1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	14	Laporan	3 laporan	3 Laporan	100
	2 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	18	laporan	4 Laporan	4 Laporan	100
	3 <i>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</i>					
	1 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	0	0	0	0	0
	4 <i>Administrasi Umum Perangkat Daerah</i>					
	1 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	4	Paket	1 Paket	1 Paket	100

	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	2	Paket	1 Paket	1 Paket	
	3	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	12	Paket	3 Paket	3 Paket	33.33
	4	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12	Laporan	3 Laporan	3 Laporan	100
	5	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					
	1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12	Laporan	3 Laporan	3 Laporan	100
	2	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12	Laporan	3 Laporan	3 Laporan	100
	6	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					
	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	60	Unit	10 Unit	10 Unit	100
	2	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	20	Unit	1 Unit	1 Unit	100
	3	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	75	Unit	10 Unit	10 Unit	100
2		PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL					
	1	Penerbitan Izin Pengumpulan Sumbangan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi					
	1	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	12	pengawasan/patrol kab/kota	0	0	0
	2	Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Provinsi					
	2	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Provinsi	144	PM	24 PM	10 - PM	0.9

	4	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Provinsi	5	LEMBAGA	1	-	0
3	PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN						
	1	<i>Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk Dipulangkan ke Daerah Kabupaten/Kota Asal</i>					
	1	Fasilitas Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk Dipulangkan ke Daerah Kabupaten/Kota Asal	600	PM	150	255	170
4	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL						
	1	<i>Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di dalam Panti</i>					
	1	Penyediaan Permakanan	177	PM	177	177	100
	2	Penyediaan Sandang	177	PM	177	177	100
	3	Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses	177	PM	177	177	100
	5	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti	177	PM	177	177	100
	6	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial	177	PM	177	177	100
	7	Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari	177	PM	177	177	100
	10	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	177	PM	177	177	100
	11	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	177	PM	177	177	100
	12	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Bidang Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar	177	PM	177	177	100

2	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti						
	1	Pengasuhan	30	PM	30	30	100
	2	Penyediaan Makanan	30	PM	30	30	100
	3	Penyediaan Sandang	30	PM	30	30	100
	4	Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses	30	PM	30	30	100
	5	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti	30	PM	30	30	100
	6	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial	30	PM	30	30	100
	7	Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari	30	PM	30	30	100
	9	Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	30	PM	30	30	100
	10	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	30	PM	30		
3	Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti						
	1	Penyediaan Permakanan	72	PM	72	72	100
	2	Penyediaan Sandang	72	PM	72	72	100
	3	Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses	72	PM	72	72	100
	4	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Sosial	72	PM	72	72	100
	5	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial	72	PM	72	72	100
	6	Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari	72	PM	72	72	100
	7	Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan bagi Penyandang Disabilitas	8	PM	5	3	60
4	8	Pemulasaraan	21	PM	6	2	33
	Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis di dalam Panti						

	1	Penyediaan Permakanan	6	PM	6	6	100
	2	Penyediaan Sandang	6	PM	6	6	100
	3	Penyediaan Asrama/Wisma yang Mudah Diakses	6	PM	6	6	100
	4	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti	6	PM	6	6	100
	5	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial	6	PM	6	6	100
	10	Pemulangan ke Daerah Asal	6	PM			
	11	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis Terlantar di dalam Panti	6	PM			
	5	Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA didalam Panti					
	1	Penyediaan Permakanan	5	PM	5	5	100
	2	Penyediaan Sandang	5	PM	5		0
	3	Penyediaan Asrama/Wisma yang Mudah Diakses	5	PM	5	5	100
4	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti	5	PM	5		0	
5	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial	5	PM	5		0	
6	Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari	5	PM	5	5	100	
7	Pemberian Bimbingan Keterampilan Dasar	5	PM	5	5	100	
8	Akses Kelayanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar						
9	Pemulangan ke Daerah Asal	5	PM	5		0	
10	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Bidang Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA	5	PM	5	5	100	

5	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL						
	1	<i>Pengangkatan Anak antar WNI dan Pengangkatan Anak oleh Orang Tua Tunggal</i>					
	1	Pengangkatan Anak antar WNI	4	Laporan	4 Laporan	4 laporan	100
	2	<i>Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Provinsi</i>					
	1	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	459	Keluarga	20 keluarga	20 keluarga	100.00%
6	PROGRAM PENANGANAN BENCANA						
	1	<i>Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Provinsi</i>					
	1	Penyediaan Permakanan	2000	Orang	-	-	0
	2	Penyediaan Sandang	0	Laporan	-	-	0
7	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN						
	1	<i>Pengelolaan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi</i>					
	1	Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi	1	kegiatan	0	0	0
	2	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi	12	Laporan	0	0	0
	3	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	40	Kelompok	20 kelompok	18 kelompok	90.00%
4	2	Pengelolaan Fakir Miskin Lintas Daerah Kabupaten/Kota	12	Laporan	3 Laporan	3 Laporan	100.00%
5	5	Pelayanan Dukungan Psikososial	200	Orang	0	0	0

	3	Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi	12	Bulan	3	3	100
8	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK						
	1	<i>Penyelenggaraan Pendaftaran Kependudukan</i>					
	1	Fasilitasi Terkait Pendaftaran Penduduk					
9	PROGRAM PENCATATAN SIPIL						
	1	<i>Penyelenggaraan Pencatatan Sipil di Provinsi</i>					
	1	Fasilitasi terkait Pencatatan Sipil	3	Kegiatan	1	1	100
10	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN						
	1	<i>Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Provinsi</i>					
	1	Fasilitasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	11	laporan	3	3	100
	2	<i>Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Provinsi</i>					
	1	Pembinaan dan Pengawasan terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	11	laporan	3	3	100
11	PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN						
	1	<i>Penyediaan Profil Kependudukan</i>					
	1	Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi kependudukan serta Kebutuhan yang lain	2	dokumen	1	1	100

1. Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Dengan memperhatikan analisis lingkungan eksternal dan internal, isu strategis Dinas Sosial, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jambi dalam tahun 2026 adalah sebagai berikut **Pertama**, Persentase PMKS yang memperoleh Perlindungan dan Jaminan Sosial, Advokasi dan Rehabilitasi, serta persentase PSKS yang aktif. **Kedua** Persentase perekaman dan pencetakan dokumen administrasi kependudukan dan pencatatan sipil.

a. Isu Strategis Bidang Sosial

Adapun yang menjadi *Isu Strategis* dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial di Provinsi Jambi adalah :

- Pemenuhan SPM Bidang Sosial yang belum maksimal
- Pendataan dan Pengelolaan Data PMKS PSKS yang belum optimal.
- Proses Verval DTKS Provinsi Jambi yang masih terkendala pada Kabupaten/Kota yang tidak mengganggu Verifikasi dan Validasi DTKS.
- Pemberdayaan PMKS dan PSKS belum berorientasi kepada peningkatan produktivitas dan Keberfungsian Sosial.
- Sarana dan Prasarana Panti dalam penerapan SPM belum memadai.

b. Isu Strategis Bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Adapun yang menjadi *Isu Strategis* dalam penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Provinsi Jambi adalah :

- Belum optimalnya pengelolaan dan pendataan penduduk di Kabupaten/Kota, hal ini ditandai dengan adanya penduduk yang belum terdaftar sehingga tidak memiliki identitas, distribusi penduduk pindah dan datang, dan pencatatan ke dalam dokumen kependudukan.
- Masih terdapat jumlah penduduk yang tidak tercatat dalam pencatatan sipil kependudukan, antara lain pencatatan kelahiran, kematian, perkawinan, perceraian, status anak, kewarganegaraan, dan pengelolaan dokumen pencatatan sipil.

BAB III

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

Rancangan Rencana Kerja Dinas Sosial Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jambi tahun 2026 disusun menyesuaikan dengan Rencana Pelaksanaan Program dan Kegiatan.

Sesuai dengan RPJMD Provinsi Jambi 2021 – 2026, maka Tujuan Dan Sasaran Dinas Sosial Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jambi adalah sebagai berikut :

NO.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Memulihkan perekonomian daerah melalui pengelolaan komoditas unggulan yang berkelanjutan (ekonomi hijau) guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat	Memantapkan kualitas pelayanan dasar dan infrastruktur dasar	Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang mendapatkan Rehabilitasi Sosial Persentase Pemenuhan Kebutuhan Korban Bencana Sesuai SPM.
2	memantapkan Tata kelola Pemerintah.	Terwujudnya Birokrasi yang kapabel dengan pelayanan publik yang prima.	Persentase Pemenuhan Pencatatan Sipil.
			Persentase Pemenuhan Pelayanan Pendaftaran Kependudukan.
			Persentase Pengelolaan Administrasi Kependudukan.
			Persentase Pengeluaran Profil Kependudukan.

A. Program dan Kegiatan Tahun 2026

Pada Tahun 2026 Dinas Sosial Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jambi masih melaksanakan program dan kegiatan sebagai berikut :

I. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI

Kegiatan :

1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
2. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD
3. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
 - Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan
4. Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor
 - Penyediaan barang cetak dan penggandaan
 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
5. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
 - Pengadaan Mebel
 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
6. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
7. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan
 - Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan
 - Lainnya

II. PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL

1. Penerbitan Izin Pengumpulan Sumbangan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi
 - Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang
2. Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Provinsi
 - Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial masyarakat Kewenangan Provinsi
 - Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Provinsi
 - Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga

Kewenangan Provinsi

- Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Provinsi

III. PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN

1. Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi Di Daerah Provinsi untuk Dipulangkan ke Daerah Kabupaten/Kota Asal
 - Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk Dipulangkan ke Daerah Kabupaten/Kota Asal

-

IV. PROGRAM REHABILITASI SOSIAL

1. Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di dalam Panti
 - Penyediaan Permakanan (Dinas Sosial, Kependudukan dan Pencatatan Sipil)
 - Penyediaan Sandang
 - Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses
 - Penyediaan Alat Bantu
 - Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti
 - Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial
 - Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari
 - Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan bagi Penyandang Disabilitas
 - Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga
 - Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga
 - Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Bidang Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar
2. Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti
 - Pengasuhan
 - Penyediaan Makanan
 - Penyediaan Sandang
 - Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses
 - Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti
 - Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial
 - Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari
 - Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar
 - Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga
3. Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti
 - Penyediaan Permakanan
 - Penyediaan Sandang
 - Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses
 - Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Sosial
 - Penyediaan Alat Bantu
 - Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial
 - Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari
 - Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan bagi Penyandang Disabilitas
 - Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga
 - Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga
 - Pemulasaraan

- Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis Terlantar di dalam Panti
- 4. Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis di dalam Panti
 - Penyediaan Permakanan
 - Penyediaan Sandang
 - Penyediaan Asrama/Wisma yang Mudah Diakses
 - Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti
 - Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial
 - Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari
 - Pemulangan ke Daerah Asal"
 - Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis Terlantar di dalam Panti
- 5. Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA di dalam Panti
 - Penyediaan Permakanan
 - Penyediaan Sandang
 - Penyediaan Asrama/Wisma yang Mudah Diakses
 - Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti
 - Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial
 - Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari
 - Pemberian Bimbingan Keterampilan Dasar
 - Pemulangan ke Daerah Asal
 - Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Bidang Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA

V. PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL

1. Pengangkatan Anak antar WNI dan Pengangkatan Anak oleh Orang Tua Tunggal
 - Pengangkatan Anak antar WNI
2. Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Provinsi
 - Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga
 - Pengelolaan Fakir Miskin Lintas Daerah Kabupaten/Kota
 - Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat

VI. PROGRAM PENANGANAN BENCANA

1. Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Provinsi
 - Penyediaan Permakanan
 - Penyediaan Sandang
 - Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi
 - Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan
 - Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan
 - Pelayanan Dukungan Psikososial

VII. PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN

1. Pengelolaan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi
 - Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi
 - Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi

- Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi

VIII. PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK

1. Pelayanan Pendaftaran Kependudukan
 - Penetapan Kebijakan Teknis di Bidang Pendaftaran Penduduk Berdasarkan Kebijakan Nasional
 - Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan administrasi Kependudukan Lintas Kabupaten/Kota dalam Satu Provinsi
2. Penyelenggaraan Pendaftaran Kependudukan
 - Fasilitasi Terkait Pendaftaran Penduduk
 - Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pendaftaran Kependudukan
3. Bimbingan Teknis terkait Pendaftaran Penduduk
 - Pembinaan dan pengawasan terkait pendaftaran penduduk

IX. PROGRAM PENCATATAN SIPIL

1. Penyelenggaraan Pencatatan Sipil di Provinsi
 - Fasilitasi terkait Pencatatan Sipil
 - Pemberian Konsultasi Penyelenggaraan Pencatatan Sipil
 - Bimbingan Teknis terkait Pencatatan Sipil

X. PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

1. Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Provinsi
 - Fasilitasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
 - Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan
2. Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Provinsi
 - Pembinaan dan pengawasan terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
 - Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan

XI. PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN

1. Penyediaan Profil Kependudukan
 - Penyediaan data kependudukan provinsi
 - Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi kependudukan serta Kebutuhan yang lain

B. Program dan Kegiatan Tahun 2026

Adapun program dan kegiatan yang direncanakan pada Tahun Anggaran 2026 dapat dilihat pada tabel berikut ini :

RENJA 2026

Uraian	Renja 2026	Indikatif 2026	Pagu rannkuappas	Pagu Kuappas
DINAS SOSIAL, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL PROVINSI JAMBI	Rp 34.298.703.888	Rp 29.260.596.204	Rp 28.214.547.783	24.296.835.744
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Rp 33.745.057.188	Rp 29.008.256.264	Rp 27.962.213.343	Rp 24.099.001.304
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	Rp 33.745.057.188	Rp 29.008.256.264	Rp 27.962.213.343	Rp 24.099.001.304
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Rp 21.381.229.059	Rp 19.482.417.071	Rp 19.757.353.090	Rp 18.354.362.051
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp 671.868.000	Rp 330.625.100	Rp 281.692.611	Rp 250.000.000
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Rp 671.868.000	Rp 330.625.100	Rp 281.692.611	Rp 250.000.000
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp 16.851.639.096	Rp 16.802.928.119	Rp 16.623.571.717	Rp 15.317.333.289
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Rp 16.575.207.096	Rp 16.575.207.119	Rp 16.395.850.717	Rp 15.124.791.289

Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Rp 276.432.000	Rp 227.721.000	Rp 227.721.000	Rp 192.542.000
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Rp 57.599.900	Rp 18.999.900	Rp 18.000.000	Rp -
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Rp 57.599.900	Rp 18.999.900	Rp 18.000.000	Rp -
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp 907.221.233	Rp 366.959.362	Rp 300.941.210	Rp 274.401.210
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Rp 35.000.000	Rp 8.563.690	Rp 11.886.295	Rp 11.886.295
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp 229.325.998	Rp 38.917.550	Rp 38.849.500	Rp 38.849.500
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Rp 50.000.000		Rp -	Rp -
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Rp 52.249.050	Rp 28.040.640	Rp 28.051.415	Rp 21.511.415
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rp 540.646.185	Rp 291.437.482	Rp 222.154.000	Rp 202.154.000
Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rp 50.000.000	Rp -	Rp -	Rp -
Pengadaan Mebel	Rp 50.000.000		Rp -	Rp -

Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp 1.544.600.830	Rp 1.432.094.590	Rp 1.918.317.552	Rp 1.918.317.552
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rp 750.000.000	Rp 712.358.400	Rp 739.598.400	Rp 739.598.400
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Rp 794.600.830	Rp 719.736.190	Rp 1.178.719.152	Rp 1.178.719.152
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp 1.298.300.000	Rp 530.810.000	Rp 614.830.000	Rp 594.310.000
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Rp 1.048.300.000	Rp 478.380.000	Rp 562.380.000	Rp 541.860.000
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp 50.000.000	Rp 11.950.000	Rp 11.950.000	Rp 11.950.000
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Rp 200.000.000	Rp 40.480.000	Rp 40.500.000	Rp 40.500.000
PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Rp 765.217.360	Rp 783.809.100	Rp 637.642.500	Rp 149.617.500
Penerbitan Izin Pengumpulan Sumbangan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Rp 35.444.000	Rp 13.583.200	Rp 13.168.000	Rp 13.168.000

Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	Rp 35.444.000	Rp 13.583.200	Rp 13.168.000	Rp 13.168.000
Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Provinsi	Rp 729.773.360	Rp 770.225.900	Rp 624.474.500	Rp 136.449.500
Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Perseorangan Kewenangan Provinsi	Rp 598.922.200	Rp 525.224.000	Rp 525.207.000	Rp 63.507.000
Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Provinsi	Rp 49.999.999	Rp 74.150.739	Rp 30.498.000	Rp 28.498.000
Koordinasi Pengusulan Akreditasi Lembaga Kesejahteraan Sosial Daerah Provinsi	Rp 57.607.000	Rp 97.607.000	Rp 56.254.000	Rp 35.254.000
Koordinasi dan Sinkronisasi Badan Usaha yang Melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan	Rp 23.244.161	Rp 73.244.161	Rp 12.515.500	Rp 9.190.500
Pengusulan Gelar Pahlawan Nasional	Rp 12.771.361	Rp 12.771.361	Rp -	Rp -
PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN	Rp 294.001.450	Rp 246.987.200	Rp 246.987.200	Rp 202.537.200

Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk Dipulangkan ke Daerah Kabupaten/Kota Asal	Rp 294.001.450	Rp 246.987.200	Rp 246.987.200	Rp 202.537.200
Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk Dipulangkan ke Daerah Kabupaten/Kota Asal	Rp 294.001.450	Rp 246.987.200	Rp 246.987.200	Rp 202.537.200
PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Rp 7.752.323.802	Rp 6.081.599.112	Rp 5.383.806.803	Rp 4.563.806.803
Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di dalam Panti	Rp 3.771.250.530	Rp 2.930.519.833	Rp 2.590.109.565	Rp 2.150.109.565
Penyediaan Permakanan	Rp 1.891.349.733	Rp 1.657.710.000	Rp 1.807.491.412	Rp 1.807.491.412
Penyediaan Sandang	Rp 273.588.266	Rp 88.284.379	Rp 133.514.152	Rp 133.514.152
Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses	Rp 1.186.484.461	Rp 1.017.996.780	Rp 469.102.041	Rp 469.102.041
Penyediaan Alat Bantu	Rp -	Rp 2.780.000		
Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti	Rp 30.469.470	Rp 18.548.300	Rp 9.467.660	Rp 9.467.660
Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial	Rp 188.000.000	Rp 78.400.000	Rp 74.400.000	Rp 74.400.000
Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari	Rp 33.515.100	Rp 13.726.040	Rp 14.856.300	Rp 14.856.300

Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan bagi Penyandang Disabilitas	Rp 1.050.000	Rp 960.000	Rp 660.000	Rp 660.000
Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Rp 20.000.000	Rp 2.397.334	Rp 24.375.000	Rp 24.375.000
Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Rp 46.047.500	Rp 41.796.000	Rp 18.743.000	Rp 18.743.000
Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Rp 46.047.500	Rp 7.921.000		
Pemulasaran	Rp 10.000.000		Rp 37.500.000	Rp 37.500.000
Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Bidang Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar	Rp.44.698.500			
Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti	Rp 1.354.985.752	Rp 1.018.811.965	Rp 1.016.897.743	916.897.743
Pengasuhan	Rp 16.478.000	Rp 2.243.000	Rp 14.400.000	Rp 14.400.000
Penyediaan Makanan	Rp 331.885.400	Rp 324.167.104	Rp 322.464.064	Rp 322.464.064
Penyediaan Sandang	Rp 64.988.692	Rp 46.655.776	Rp 83.513.460	Rp 83.513.460
Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses	Rp 405.624.410	Rp 389.066.166	Rp 336.809.223	Rp 336.809.223
Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti	Rp 5.203.044	Rp 5.282.477	Rp 4.090.896	Rp 4.090.896
Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial	Rp 69.759.746	Rp 42.194.322	Rp 38.446.200	Rp 38.446.200

Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari	Rp 111.428.460	Rp 51.711.120	Rp 44.826.000	Rp 44.826.000
Fasilitasi Pembuatan Akta Kelahiran, Nomor Induk Kependudukan, dan Kartu Identitas Anak	Rp 1.872.000	Rp 2.250.000	Rp 900.000	Rp 900.000
Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Rp 180.420.000	Rp 129.400.000	Rp 136.497.900	Rp 136.497.900
Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Rp 60.270.000	Rp 13.090.000	Rp 15.410.000	Rp 15.410.000
Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Rp 32.232.000	Rp 12.752.000	Rp 12.750.000	Rp 12.750.000
Akses Layanan Pengasuhan kepada Keluarga Penganti	Rp 4.010.000		Rp 1.650.000	Rp 1.650.000
Pemulasaran	Rp 10.000.000		Rp 2.500.000	Rp 2.500.000
Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti	Rp 60.814.000		Rp 2.640.000	Rp 2.640.000
Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti	Rp 1.552.252.748	Rp 1.358.411.044	Rp 1.231.866.966	Rp 991.866.966
Penyediaan Permakanan	Rp 895.179.600	Rp 801.000.000	Rp 788.460.000	Rp 788.460.000
Penyediaan Sandang	Rp 105.000.000	Rp 24.480.000	Rp 20.160.000	Rp 20.160.000
Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses	Rp 185.240.000	Rp 166.018.484	Rp 173.393.380	Rp 173.393.380

Penyediaan Alat Bantu				
Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Sosial	Rp 185.078.400	Rp 200.614.951	Rp 72.836.898	Rp 72.836.898
Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial	Rp 72.600.000	Rp 71.100.000	Rp 72.600.000	Rp 72.600.000
Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari	Rp 8.905.748	Rp 57.285.322	Rp 60.926.688	Rp 60.926.688
Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan bagi Penyandang Disabilitas	Rp 2.700.000	Rp 1.350.000	Rp 1.350.000	Rp 1.350.000
Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar				
Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga				
Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Rp 30.049.000			
Pemulasaraan	Rp 36.000.000	Rp 25.000.000	Rp 30.000.000	Rp 30.000.000
Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis Terlantar di dalam Panti	Rp 31.500.000	Rp 11.562.287	Rp 12.140.000	Rp 12.140.000
Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis di dalam Panti	Rp 315.834.915	Rp 230.946.965	Rp 176.692.321	Rp 151.692.321
Penyediaan Permakanan	Rp 106.695.000	Rp 106.695.000	Rp 67.275.000	Rp 67.275.000

Penyediaan Sandang	Rp 25.889.982	Rp 14.108.762	Rp 10.988.917	Rp 10.988.917
Penyediaan Asrama/Wisma yang Mudah Diakses	Rp 85.278.672	Rp 76.724.664	Rp 73.437.390	Rp 73.437.390
Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti	Rp 6.088.302	Rp 5.939.281	Rp 3.398.014	Rp 3.398.014
Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial	Rp 14.947.990	Rp 9.775.415	Rp 6.000.000	Rp 6.000.000
Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari	Rp 31.950.000	Rp 6.900.000	Rp 7.200.000	Rp 7.200.000
Pemberian Bimbingan Keterampilan Dasar	Rp 8.174.969	Rp 2.444.843	Rp 1.300.000	Rp 1.300.000
Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Identitas Anak	Rp 28.000	Rp 28.000	Rp -	Rp -
Akses Kelayanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Rp 84.000	Rp 84.000	Rp -	Rp -
Pemulangan ke Daerah Asal	Rp 15.154.000	Rp 8.247.000	Rp -	Rp -
Pemulasaran	Rp 10.000.000		Rp 5.000.000	Rp 5.000.000
Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis Terlantar di dalam Panti	Rp 11.544.000		Rp 2.093.000	Rp 2.093.000

Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA di dalam Panti	Rp 757.999.857	Rp 542.909.305	Rp 368.240.208	Rp 353.240.208
Penyediaan Permakanan	Rp 106.695.000	Rp 106.695.000	Rp 77.130.000	Rp 77.130.000
Penyediaan Sandang	Rp 24.520.060	Rp 11.580.600	Rp 9.007.405	Rp 9.007.405
Penyediaan Asrama/Wisma yang Mudah Diakses	Rp 85.950.736	Rp 78.946.104	Rp 60.885.021	Rp 60.885.021
Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti	Rp 3.755.242	Rp 3.755.242	Rp 3.755.242	Rp 3.755.242
Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial	Rp 22.500.000	Rp 3.600.000	Rp 3.600.000	Rp 3.600.000
Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari	Rp 10.123.800	Rp 9.899.800	Rp 10.602.540	Rp 10.602.540
Pemberian Bimbingan Keterampilan Dasar	Rp 10.189.019	Rp 3.482.059	Rp 3.172.000	Rp 3.172.000
Akses Kelayanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Rp 14.000		Rp -	Rp -
Pemulangan ke Daerah Asal	Rp 24.252.000	Rp 11.250.000	Rp 6.365.000	Rp 6.365.000
Pemulasaran	Rp 10.000.000			

Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Bidang Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA	Rp 10.000.000		Rp 6.365.000	Rp 6.365.000
Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial melalui Asistensi Rehabilitasi Sosial bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	Rp 350.000.000	Rp 133.893.500	Rp 87.358.000	Rp 87.358.000
Pengembangan dan Kampanye Sosial Peduli Anak, Lanjut Usia dan Disabilitas serta Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Lainnya	Rp 100.000.000	Rp 179.807.000	Rp 100.000.000	Rp 85.000.000
PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Rp 2.455.998.360	Rp 1.789.256.370	Rp 1.314.032.150	Rp 348.092.150
Pengangkatan Anak antar WNI dan Pengangkatan Anak oleh Orang Tua Tunggal	Rp 80.000.000	Rp 44.067.570	Rp 44.067.570	Rp 38.067.570
Pengangkatan Anak antar WNI	Rp 80.000.000	Rp 44.067.570	Rp 44.067.570	Rp 38.067.570
Pengangkatan Anak oleh Orang Tua Tunggal				

Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Provinsi	Rp 2.375.998.360	Rp 1.745.188.800	Rp 1.269.964.580	Rp 310.024.580
Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Rp 1.737.490.020	Rp 1.452.391.500	Rp 995.191.500	Rp 80.791.500
Pengelolaan Fakir Miskin Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Rp 175.387.300	Rp 116.924.000	Rp 98.904.000	Rp 78.364.000
Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Rp 463.121.040	Rp 175.873.300	Rp -	Rp -
Fasilitasi Bantuan Stimulan Modal Usaha dan pendampingan bagi Fakir Miskin Lintas Daerah Kabupaten/Kota			Rp 175.869.080	Rp 150.869.080
PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Rp 877.040.000	Rp 480.194.836	Rp 480.194.836	Rp 360.388.836
Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Provinsi	Rp 877.040.000	Rp 480.194.836	Rp 480.194.836	Rp 360.388.836
Penyediaan Permakanan	Rp 449.296.600	Rp 382.763.800	Rp 382.763.800	Rp 262.957.800
Penyediaan Sandang	Rp 101.098.400	Rp 53.098.400	Rp 53.098.400	Rp 53.098.400
Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	Rp 90.000.000	Rp 13.000.000	Rp 13.000.000	Rp 13.000.000
Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	Rp 136.645.000	Rp 16.489.636	Rp 16.489.636	Rp 16.489.636
Pelayanan Dukungan Psikososial	Rp	Rp	Rp	Rp

	100.000.000	14.843.000	14.843.000	14.843.000
PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	Rp 219.247.157	Rp 143.992.575	Rp 142.196.764	Rp 120.196.764
Pengelolaan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi	Rp 219.247.157	Rp 143.992.575	Rp 142.196.764	120.196.764
Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi	Rp 37.741.980	Rp 21.811.000	Rp 37.737.520	Rp 37.737.520
Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi	Rp 109.505.177	Rp 50.181.575	Rp 50.459.244	Rp 50.459.244
Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi	Rp 72.000.000	Rp 72.000.000	Rp 54.000.000	Rp 54.000.000
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Rp 553.646.700	Rp 252.339.940	Rp 252.334.440	Rp 197.834.440
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	Rp 553.646.700	Rp 252.339.940	Rp 252.334.440	Rp 197.834.440
PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Rp 150.800.000	Rp 63.852.040	Rp 63.852.040	Rp 51.352.040
Penyelenggaraan Pendaftaran Kependudukan	Rp 150.800.000	Rp 63.852.040	Rp 63.852.040	Rp 51.352.040
Fasilitasi Terkait Pendaftaran Penduduk	Rp 150.800.000	Rp 63.852.040	Rp 63.852.040	Rp 51.352.040

Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pendaftaran Kependudukan	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -
Pembinaan dan Pengawasan terkait Pendaftaran Penduduk				
PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Rp 128.011.000	Rp 58.626.000	Rp 58.626.000	Rp 47.626.000
Penyelenggaraan Pencatatan Sipil di Provinsi	Rp 128.011.000	Rp 58.626.000	Rp 58.626.000	Rp 47.626.000
Fasilitasi terkait Pencatatan Sipil	Rp 128.011.000	Rp 58.626.000	Rp 58.626.000	Rp 47.626.000
Pemberian Konsultasi Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -
Pembinaan dan Pengawasan terkait Pencatatan Sipil				
PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Rp 259.954.000	Rp 124.065.900	Rp 124.059.400	Rp 94.059.400
Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Provinsi	Rp 111.332.000	Rp 36.392.000	Rp 40.649.500	Rp 35.649.500
Fasilitasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Rp 111.332.000	Rp 36.392.000	Rp 40.649.500	Rp 35.649.500

Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Provinsi	Rp 148.622.000	Rp 87.673.900	Rp 83.409.900	Rp 58.409.900
Pembinaan dan Pengawasan terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Rp 148.622.000	Rp 87.673.900	Rp 83.409.900	Rp 58.409.900
PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	Rp 14.881.700	Rp 5.796.000	Rp 5.797.000	Rp 4.797.000
Penyediaan Profil Kependudukan	Rp 14.881.700	Rp 5.796.000	Rp 5.797.000	Rp 4.797.000
Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi kependudukan serta Kebutuhan yang lain	Rp 14.881.700	Rp 5.796.000	Rp 5.797.000	Rp 4.797.000
TOTAL	Rp 34.298.703.888	Rp 29.260.596.204	Rp 28.214.547.783	Rp 24.296.835.744

BAB V PENUTUP

Dokumen Renja ini selanjutnya akan menjadi pedoman bagi Dinas Sosial Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jambi di dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan satu tahun kedepan, sehingga perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1. Perumusan program dan kegiatan beserta indikatornya pada Renja Dinas Sosial Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jambi pada prinsipnya diarahkan untuk mendukung pencapaian visi dan misi pemerintah Provinsi Jambi.
2. Penyusunan Renja Dinas Sosial Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jambi ini berpedoman pada Renstra Dinas Sosial Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jambi 2021-2026, seluruh program dan kegiatan beserta indikator pada Renstra untuk tahun 2026 telah termuat dalam Renja. Selain itu terdapat penambahan output/keluaran kegiatan sebagai respon terhadap kebutuhan atau isu-isu strategis.
3. Penyusunan Renja ini juga berpedoman pada RKPD Provinsi Jambi, dengan tujuan untuk menjaga konsistensi antar dokumen perencanaan.
4. Renja Dinas Sosial Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jambi ini akan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Provinsi Jambi Tahun 2026.
5. Dalam penyusunan RKA nantinya dimungkinkan terjadi berdasarkan hasil review yang dilaksanakan oleh inspektorat Provinsi Jambi, begitu pula dalam penyusunan DPA dimungkinkan terjadinya berdasarkan hasil pembahasan bersama DPRD Provinsi Jambi.

Selanjutnya Rencana Kerja Dinas Sosial Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jambi tahun 2026 ini merupakan pedoman bagi seluruh aparatur Dinas Sosial Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jambi dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Sosial Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jambi.

Dalam melaksanakan Rencana Kerja yang telah ditetapkan tersebut, Dinas Sosial Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jambi juga memerlukan dukungan dan

partisipasi aktif dari Dinas/Instansi/Lembaga terkait dan Pemerintah Kabupaten/Kota serta Pemerintah Pusat. Keberhasilan dari pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Sosial Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jambi ini akan tergambar dalam Laporan Kinerja Instansi (LKj).

Jambi, Oktober 2025

Kepala Dinas,



EDY KUSMIRAN, S.STP

Pembina Utama Muda – IV/c

NIP19770413 199711 1 001